

# PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah)

Tika Aristy<sup>1</sup>  
Fatchan Achyani<sup>2</sup>

\*Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta

\*Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta

\*Email: tikaaristi7@gmail.com, fa185@umc.ac.id

**ABSTRACT:** *This study to analyze the influence of the characteristic of local governments on the financial performance of local governments by using proxy size of local government, intergovernmental revenue, regional expenditure, and leverage on district / cities in Central Java Province in 2015-2016. The population used in this study is the regional government in Central Java Province in 2015-2016 consisting of 29 Regencies and 6 Cities. The sampling technique uses purposive sampling method with a total sample of 35 cities/ regencies with a period of time of 2 years. Analysis of the data using multiple linear regression analysis. The results showed that the size of the regional government and intergovernmental revenue had an effect on the financial performance of the local government, while the regional expenditure and leverage had no effect on the financial performance of the regional government.*

**Keywords :** *local government financial performance, local government size, intergovernmental revenue, regional expenditure, leverage*

## 1. PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 No 32 Tahun 2004 menegaskan bahwa pemerintah daerah dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Pada kenyataannya kebijakan otonomi daerah yang diterapkan pemerintah pusat belum dapat berjalan dengan baik karena masih banyak terjadi kesenjangan antara daerah di Indonesia (Adi,2005). Oleh karena itu pemerintah daerah harus menyelenggarakan pemerintahannya agar tercipta *good governance* yang baik..

Penyajian laporan keuangan sebagai suatu bentuk akuntabilitas pemerintah untuk dan mempublikasikan laporan keuangan kepada pemangku kepentingan. Pemerintah daerah dituntut untuk lebih terbuka dalam memberikan informasi yang terkait dengan *Seminar Nasional dan The 6th Call for Syariah Paper*  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.

Masih banyaknya permasalahan-permasalahan yang muncul karena kurangnya transparansi dan akuntabilitas publik yang diberikan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu dibutuhkan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian “ PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah).

## 2. KAJIAN LITERATUR DAN HIPOTESIS

### Teori Keagenan

Salah satu teori yang digunakan ialah *Agency theory* menyangkut hubungan kontraktual antara dua pihak yaitu *principal* dan *agent*. Masyarakat sebagai *agent* sedangkan *pricipal* adalah pemerintah. Adapun permasalahan yang nantinya muncul dalam teori ini adalah mengenai *agent* yang ingin mengetahui dengan jelas bagaimana pemerintah daerah mengelola keuangannya agar dapat memberikan fasilitas yang baik untuk masyarakat. Sehingga pemerintah bertanggung jawab untuk mngelola dan mempublikasi hasil kerjanya kepada masyarakat.

### Pengembangan Hipotesis

#### Pengaruh Ukuran Pemerintah (*size*) Terhadap Kinerja Keuangan

Ukuran pemerintah dapat dihitung menggunakan total aset. Total aset yang besar dalam pemerintahan akan memberikan kemudahan dalam kegiatan operasional untuk memberikan fasilitas dan sumberdaya yang memadai untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Semakin besar ukuran pemerintah daerah semakin tinggi kinerja keuangan yang diberikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Kusumawardani (2012) dan Aziz (2016) menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah (*size*) berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

H1 : *Size* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

#### Pengaruh *Intergovernmental Revenue* Terhadap Kinerja Keuangan

*Intergovernmental Revenue* adalah dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga dapat terlaksana pelayanan kepada masyarakat seperti. *Intergovernmental Revenue* juga disebut dengan dana perimbangan. Dana yang didapatkan membuat pemda memiliki

tanggung jawab untuk melaporkan keuangannya kepada pemerintah pusat, sehingga meningkatkan kinerja keuangannya.

Penelitian yang dilakukan Sesotyaningtyas (2012), Laila, Herawati dan Ethika (2016), Mulyani dan Wibowo (2017) menyatakan bahwa *intergovernmental revenue* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian tersebut diajukan hipotesis sebagai berikut :

H2 : *Intergovernmental Revenue* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

**Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan**

Belanja daerah digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan, fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak, dan mengembangkan sistem jaminan sosial.

Penelitian yang dilakukan oleh Aziz (2016) dan Garini (2015) menyatakan bahwa belanja daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian tersebut diajukan hipotesis sebagai berikut H3 : Belanja Daerah berpengaruh terhadap keuangan pemerintah daerah

**Pengaruh *Leverage* Terhadap Kinerja Keuangan**

*Leverage* adalah perbandingan antara utang dan modal. Semakin kecil utang kepada pihak eksternal maka menunjukkan tingginya pendapatan daerah yang dimiliki sehingga ketergantungan kepada pihak eksternal semakin kecil dan menunjukkan semakin baiknya kinerja keuangan pemerintah daerah. Apabila *leverage* kecil maka beban biaya untuk membayar utang juga kecil, sehingga PAD ( Pendapatan Asli Daerah) bisa digunakan untuk pembangunan daerah.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Kusumawardani (2012) dan Sari (2016) dan menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian tersebut diajukan hipotesis sebagai berikut :H4 : *Leverage* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

### 3. METODE PENELITIAN

**Populasi dan Sampel**

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah periode pengamatan tahun 2015-2016. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling* dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang sesuai dengan variabel penelitian. Metode ini dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi berdasarkan kriteria tertentu.

kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah :

*Seminar Nasional dan The 6th Call for Syariah Paper*  
*Universitas Muhammadiyah Surakarta*

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2015-2016 dari Badan Pengelolaan Keuangan (BPK) Jawa Tengah.

Menyediakan komponen laporan keuangan Pemerintah Daerah, yaitu Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.

#### Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten/Kota di Jawa Tengah periode 2015-2016 yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Tengah.

#### Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka variable dependen dalam penelitian ini adalah kinerja Keuangan, sedangkan variable independen dalam penelitian ini adalah ukuran pemerintah daerah (*size*), *intergovernmental revenue*, belanja daerah, dan *leverage*.

#### Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan menggambarkan sebuah ukuran kinerja dengan indikator keuangan. Pengukuran kinerja pemerintah daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Moore,2003) dalam Aziz (2016). Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.

Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100 persen. Rasio perhitungan efisiensi yaitu :

$$Efisiensi = \frac{\text{Realisasi pengeluaran}}{\text{Realisasi pendapatan}}$$

#### Ukuran Pemerintah Daerah (*size*)

Variabel ukuran pemerintah daerah (*size*) dapat diukur dengan menggunakan total aset pemerintah daerah karena aset menunjukkan sumberdaya ekonomi yang dimiliki suatu daerah. Total aset daerah dapat diperoleh dari dalam laporan neraca daerah.

#### *Intergovernmental revenue*

*Intergovernmental revenue* atau tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat. *Intergovernmental revenue* merupakan bagian dari pendapatan yang berasal dari lingkungan eksternal. Penelitian ini menggunakan rasio hitung :

$$Intergovernmental revenue = \frac{\text{Dana perimbangan}}{\text{Total Pendapatan}}$$

#### Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran. Belanja daerah dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung meliputi belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada propinsi/kabupaten dan pemerintah desa, belanja tidak terduga. Sedangkan, belanja langsung meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal. Variabel belanja daerah dapat diukur dengan menggunakan total realisasi belanja daerah.

#### *Leverage*

Dalam akuntansi sektor publik, *leverage* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar suatu daerah tergantung pada kreditur dalam membiayai aset daerahnya.

*Leverage* dapat diukur dengan menggunakan *debt to equity ratio (DER)* yaitu dengan membandingkan total utang dengan total ekuitas yang tersaji dalam laporan neraca.

*Debt equity ratio (DER)* dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Debt to Equity Ratio (DER)} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aset}}$$

### **METODE ANALISIS DATA**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Model penelitian sebagai berikut:

$$KK = a + b_1 \text{ SIZE} + b_2 \text{ IRV} + b_3 \text{ BD} + b_4 \text{ LEV} + e$$

Keterangan:

|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| KM       | = Kinerja Keuangan                 |
| SIZE     | = Ukuran Pemerintah Daerah         |
| IRV      | = <i>Intergovernmental Revenue</i> |
| BD       | = Belanja Daerah                   |
| LEV      | = <i>Leverage</i>                  |
| $\alpha$ | = konstanta                        |
| $\beta$  | = Koefesien                        |
| e        | = error                            |

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Analisis Statistik Deskriptif**

#### **Uji Normalitas**

**Tabel 4.1**  
**Uji Normalitas**

| Keterangan           | Unstandardized Residual |
|----------------------|-------------------------|
| Kolmogorov-Smirnov Z | 0,854                   |
| Asymp.Sig.(2-Tailed) | 0,459                   |

Sumber: Data Sekunder diolah, 2019

Tabel 4.1, menunjukkan bahwa besarnya nilai Kolmogorov-Smirnov adalah 0,854 dengan nilai *Asymp.Sig. (2-tailed)* sebesar 0,459 atau 45,9% hal ini menunjukkan bahwa data telah terdistribusi secara normal, karena lebih dari 0,05 atau 5%.

### Uji Multikolinearitas

**Tabel 4.2**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

| Variabel | Tolerance | VIF   | Keterangan                     |
|----------|-----------|-------|--------------------------------|
| SIZE     | 0,725     | 1,379 | Tidak Terjadi Multikolineritas |
| IRV      | 0,736     | 1,359 | Tidak Terjadi Multikolineritas |
| BD       | 0,980     | 1,020 | Tidak Terjadi Multikolineritas |
| LEV      | 0,985     | 1,015 | Tidak Terjadi Multikolineritas |

Sumber: Data Sekunder diolah, 2019

Dilihat dari tabel diatas menunjukkan bahwa masing-masing variabel mempunyai tolerance value lebih besar dari 0,10 dan VIF kurang dari 10 yang artinya bebas multikolinearitas.

### Uji Heterokedastisitas

**Tabel 4.3**  
**Hasil uji Heterokedastisitas**

| Variabel | Sig.  | Keterangan                        |
|----------|-------|-----------------------------------|
| SIZE     | 0,415 | Tidak Terjadi Heteroskedastisitas |
| IRV      | 0,410 | Tidak Terjadi Heteroskedastisitas |
| BD       | 0,564 | Tidak Terjadi Heteroskedastisitas |
| LEV      | 0,637 | Tidak Terjadi Heteroskedastisitas |

Sumber: Data Sekunder diolah, 2019

Hasil daritabel diatas dapat diketahui bahwa masing-masing variable mempunyai nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa semua variable independen bebas dari masalah heterokedastisitas.

### Uji Autokorelasi

**Tabel 4.4**  
**Hasil Uji Atokorelasi**

| Model | R                  | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
|-------|--------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| 1     | 0,460 <sup>a</sup> | 0,212    | 0,159             | 0,1053606832               | 1,952         |

Sumber: Data Sekunder diolah, 2019

Berdasarkan nilai *Durbin Watson* pada tabel IV.6 menunjukkan nilai 1,952 berarti angka *DW* berada diantara -2 sampai +2 berarti model regresi tidak menunjukkan adanya korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan pengganggu pada periode t-1 sehingga dapat disimpulkan bahwa model terbebas dari autokorelasi.

### Pengujian Hipotesis

#### Hasil Analisis Regresi Berganda

*Seminar Nasional dan The 6th Call for Syariah Paper*  
*Universitas Muhammadiyah Surakarta*

**Tabel 4.5**  
**Hasil Uji Regresi Linear Berganda**

| Variabel   | Coefficients | T     | Sig.  | Keterangan       |
|------------|--------------|-------|-------|------------------|
| (constant) | 0,421        | 3,009 | 0,004 |                  |
| SIZE       | 0,009        | 2,435 | 0,018 | Signifikan       |
| IRV        | 0,796        | 3,756 | 0,000 | Signifikan       |
| BD         | 7,355E-005   | 1,372 | 0,175 | Tidak Signifikan |
| LEV        | 0,096        | 0,049 | 0,675 | Tidak Signifikan |

Sumber: Data Sekunder diolah, 2019

Berdasarkan analisis table tersebut dapat dilihat rumus persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$KK = 0,421 + 0,009SIZE + 0,796IRV + 7,355BD + 0,096LEV + e$$

Berdasarkan persamaan regresi linier berganda diatas, maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

1. Nilai konstanta sebesar 0,421 berarti jika ukuran pemerintah daerah (*size*), *intergovernmental revenue*, belanja daerah dan *leverages* sama dengan nol, maka kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik.
2. Koefisien regresi variabel ukuran pemerintah daerah (*size*) menunjukkan nilai positif sebesar 0,009 berarti apabila variabel ukuran pemerintah daerah (*size*) naik sebesar 1 persen dengan asumsi variabel lainnya tetap, maka akan diikuti penurunan kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 0,009.
3. Koefisien regresi *intergovernmental revenue* menunjukkan nilai positif sebesar 0,796 berarti apabila variabel *intergovernmental revenue* naik sebesar 1 persen dengan asumsi variabel lainnya tetap, maka akan diikuti penurunan kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 0,796.
4. Koefisien regresi Belanja Daerah menunjukkan nilai positif sebesar 7,355 berarti jika apabila variabel belanja daerah naik sebesar 1 persen dengan asumsi variabel lainnya tetap, maka akan diikuti penurunan kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 7,355.
5. Koefisien regresi *leverage* menunjukkan nilai positif sebesar 0,096 berarti jika apabila variabel *leverage* naik sebesar 1 persen dengan asumsi variabel lainnya tetap, maka akan diikuti penurunan kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 0,096.

#### Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

**Tabel 4.6**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi**

| Model | R Square | Adjusted Square | R | Std. Error of the Estimate |
|-------|----------|-----------------|---|----------------------------|
| 1     | 0,212    | 0,159           |   | 0,1053606832               |

Sumber: Data Sekunder diolah, 2019

Koefisien deteminasi (Adjusted R<sup>2</sup>) dalam tabel IV.8 menunjukkan nilai sebesar 0,159 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen yaitu Ukuran Pemerintah Daerah (*size*), *intergovernmental revenue*, Belanja Daerah dan *Leverage* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 15,9% kemudian sisanya 84,1 % dipengaruhi oleh faktor lain diluar variable yang diteliti.

### Uji F

**Tabel 4.7**  
**Hasil Uji F**

| <b>F<sup>hitung</sup></b> | <b>F<sup>tabel</sup></b> | <b>Sig.</b>        | <b>Keterangan</b>    |
|---------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|
| 3,969                     | 2,76                     | 0,006 <sup>b</sup> | Berpengaruh Simultan |

Sumber: Data Sekunder diolah, 2019

Hasil dari uji F dalam tabel IV.9 menyebutkan bahwa nilai F hitung > F tabel yaitu 3,969 > 2,76 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,006 dikarenakan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen yaitu ukuran pemerintah daerah (*size*), *intergovernmental revenue*, belanja daerah, *leverage* telah menunjukkan model yang tepat.

### Uji t

**Tabel 4.8**  
**Hasil Uji t**

| <b>Variabel</b>                  | <b>t<sup>hitung</sup></b> | <b>Sig.</b> | <b>Keterangan</b>       |
|----------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------|
| Ukuran pemda ( <i>size</i> )     | 2,435                     | 0,018       | H <sub>1</sub> diterima |
| <i>Intergovernmental revenue</i> | 3,756                     | 0,000       | H <sub>2</sub> diterima |
| Belanja daerah                   | 1,372                     | 0,175       | H <sub>3</sub> ditolak  |
| <i>Leverage</i>                  | 0,049                     | 0,675       | H <sub>4</sub> ditolak  |

Sumber: Data Sekunder diolah, 2019

Berdasarkan tabel 4.8 didapatkan hasil sebagai berikut :

- Nilai signifikansi ukuran pemerintah daerah (*size*) menunjukkan nilai 0,018 yang *size* berpengaruh terhadap kinerja keuangan karena nilai signifikansi variabel ukuran pemerintah daerah (*size*) sebesar 0,018 dinyatakan lebih kecil dari kriteria yang ditetapkan yaitu sebesar 0,05 sehingga dapat disimpulkan H<sub>1</sub> diterima.
- Nilai signifikansi *Intergovernmental revenue* menunjukkan nilai 0,000 yang berarti *intergovernmental revenue* berpengaruh terhadap kinerja keuangan karena nilai signifikansi variabel *intergovernmental revenue* sebesar 0,000 dinyatakan lebih kecil dari kriteria yang ditetapkan yaitu sebesar 0,05 sehingga dapat disimpulkan H<sub>2</sub> diterima.
- Nilai signifikansi Belanja Daerah menunjukkan nilai 0,175 yang berarti belanja daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan karena nilai signifikansi variabel belanja daerah lebih besar dari kriteria yang ditetapkan yaitu sebesar 0,05 sehingga dapat disimpulkan H<sub>3</sub> ditolak.

- d. Nilai signifikansi *leverage* menunjukkan nilai 0,675 yang berarti *leverage* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan karena nilai signifikansi variabel *leverage* lebih besar dari kriteria yang ditetapkan yaitu sebesar 0,05 sehingga dapat disimpulkan  $H_4$  ditolak.

### **Pembahasan**

#### **Pengaruh ukuran pemerintah daerah (*size*) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah**

Berdasarkan tabel 4.5 variabel ukuran pemerintah daerah (*size*) menunjukkan koefisien regresi sebesar 0,009 dengan tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) sebesar 0,018 lebih kecil dari 5% maka  $H_1$  diterima. Berarti ukuran pemerintah daerah (*size*) berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kusumawardani (2012), Aziz (2016), Sari (2016) dan Mulyani dan Wibowo (2017) yang menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah (*size*) berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Ukuran pemerintah daerah dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan total aset daerah. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa besarnya total aset mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Aset yang dimiliki suatu daerah dapat memberikan kemudahan dalam kegiatan operasional untuk memenuhi kewajiban pemerintah daerah yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat, seperti pembangunan jembatan, jalan, dan transportasi umum. Pelayanan yang ditujukan masyarakat diberikan dengan baik menunjukkan kinerja pemerintah daerah yang baik sehingga kinerja keuangannya juga baik..

#### **Pengaruh *Intergovernmental Revenue* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah**

Berdasarkan tabel 4.5. variabel *intergovernmental revenue* menunjukkan koefisien regresi sebesar 0,000 dengan tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) sebesar 0,000 lebih kecil dari 5% maka  $H_2$  diterima. Berarti *intergovernmental revenue* berpengaruh terhadap kinerja keuangan Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sesotyaningtyas (2012) Laila, Herawati dan Ethika (2016).

*Intergovernmental revenue* digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah daerah agar dapat terlaksana pelayanan kepada masyarakat atau bisa disebut dengan dana perimbangan. Semakin tinggi dana transfer yang didapatkan, maka dapat membantu pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat. Apabila suatu daerah mendapatkan dana transfer yang besar dari pemerintah pusat, maka semakin besar juga tanggung jawab pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja keuangannya. Aset yang besar jga memiliki tanggung jawab yang besar kepada publik.

#### **Pengaruh Belanja Daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah**

Berdasarkan tabel 4.5 variabel belanja daerah menunjukkan koefisien regresi sebesar 0,175 dengan tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) sebesar 0,175 lebih besar dari 5% maka  $H_3$  ditolak. Berarti belanja daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hasil

penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nugroho dan Prasetyo (2018).

Belanja daerah merupakan pengeluaran anggaran daerah yang dianggarkan untuk penyelenggaraan program dan kegiatan pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat. Pada tahun 2015 total belanja daerah menunjukkan presentase sebesar 49,72% belanja operasional, belanja modal 14,11%, belanja tidak terduga 0,07, dan belanja transfer 36,10%, dan pada tahun 2016 total belanja daerah menunjukkan presentase sebesar 53,45%, belanja modal 14,55%, belanja tidak terduga 0,03%, dan belanja transfer 31,98%. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa pengeluaran anggaran belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja yang sifatnya rutin. Belanja rutin tidak dapat dijadikan tolak ukur untuk penentuan kinerja keuangan karena termasuk anggaran yang sudah pasti dan sifatnya tetap. Sehingga belanja daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

#### **Pengaruh *Leverage* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah**

Berdasarkan tabel 4.5 variabel *leverage* menunjukkan koefisien regresi sebesar 0,675 dengan tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) sebesar 0,675 lebih besar dari  $\alpha$ -5% maka  $H_4$  ditolak. Berarti *leverage* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sesotyaningtyas (2012) dan bertolakbelakang dengan penelitian Kusumawardani (2012) dan Sari (2016).

*Leverage* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten/kota di Jawa Tengah. Hal ini dikarenakan kabupaten/kota di Jawa Tengah memiliki dana internal yang kuat untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya. Selain itu Pemerintah daerah juga mendapatkan dana bantuan dari pemerintah pusat, sehingga tidak bergantung pada pinjaman dari pihak investor.

### **5. KESIMPULAN**

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu ukuran pemerintah daerah dan *intergovernmental revenue*. Ukuran pemerintah daerah yang diukur dengan menggunakan total aset daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan karena aset dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Pelayanan yang ditujukan masyarakat diberikan dengan baik menunjukkan kinerja pemerintah daerah yang baik sehingga kinerja keuangannya juga baik. *Intergovernmental revenue* berpengaruh terhadap kinerja keuangan karena dana primbangan didapatkan dari pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah bertanggung jawab untuk meningkatkan kinerja keuangannya.

Terdapat 2 variabel yang tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu belanja daerah dan *leverage*. Belanja daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan karena belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja yang bersifat rutin, belanja rutin merupakan belanja yang bersifat tetap. *Leverage* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan karena pemda memiliki alternatif lain selain hutang, yaitu dana transfer dari pemerintah pusat.

### **Keterbatasan Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian, keterbatasan yang ada dalam penelitian ini sebagai berikut :

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya dua tahun sehingga kurang representatif.

1. Objek yang diteliti hanya mencakup kabupaten/kota yang berada di satu provinsi saja yaitu provinsi Jawa Tengah.
2. Variabel yang digunakan hanya mencakup ukuran pemerintah daerah, *intergovernmental revenue*, belanja daerah, dan *leverage*. Hasil yang berbeda mungkin akan diperoleh apabila peneliti menambah variabel-variabel yang terkait.

### **Saran**

Berdasarkan simpulan dan keterbatasan dalam penelitian ini, maka dapat dikemukakan beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya, yaitu sebagai berikut :

1. Menambah tahun periode pengamatan, dengan cara memilih periode yang sekiranya bisa representatif dalam menjelaskan kondisi kinerja keuangan pemerintah daerah.
2. Memperluas objek penelitian, dengan cara menambah sampel penelitian dari kabupaten maupun kota yang berada di provinsi lain.
3. Menambah variabel yang ada dengan variabel yang lain agar hasilnya dapat menggambarkan kondisi kinerja keuangan pemerintah daerah.

## **6. REFERENSI**

- [1]. Adi, Priyo Hari. 2005, Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah. Proceeding Simposium Nasional Akuntansi IX, Padang
- [2]. Aziz.,Asmaul.2016. pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Vol.XI No.1, ISSN: 1907-7513
- [3]. Ardy Garini, 2015 Pengaruh Belanja Daerah, Temuan Audit dan Size Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia). Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang..
- [4]. Kusumawardani,Media.2012. Pengaruh size, kemakmuran,ukuran legislatif, leverage, terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di indonesia. Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi.ISSN: 2252-6765.
- [5]. Mulyani dan Wibowo.2017. pengaruh belanja modal, ukuran pemerintah daerah, intergovernmental revenue dan pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan. Vol.XV No.1. Maret 2017

- [6]. Nugroho dan Prasetyo.2018. pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota di jawa timur. p-ISSN- 2302-6251 e-ISSN: 2477-4995 E jurnal Akuntansi dan Pendidikan Vol.7 No.1. Hal 27-34. April 2018
- [7]. Sari,Indah puspa.2016. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pad, Leverage, Dana Perimbangan Dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Keuangan. Jurnal ekonomi Vol.3 No.1.
- [8]. Sesotyoningtyas,Mirna.2012. pengaruh leverage, ukuran legislatif intergovernmental revenue, dan pendapatan pajak daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.Jurnal Akuntansi,Fakultas Ekonomi.ISSN: 2252-6765.
- [9]. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.